

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DI DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DISDIKPORA) KABUPATEN BADUNG

Oleh:

Ni Made Suarningtyas Maharani
Politeknik Negeri Bali.

A
B
S
T
R
A
K

Transparansi anggaran harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat awam juga dapat mengetahui dan mengaksesnya. Kondisi tersebut di atas melatarbelakangi penelitian ini dalam rangka menganalisis (1) Bagaimanakah implementasi pengelolaan anggaran untuk meningkatkan transparansi di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung berdasarkan Perda Kabupaten Badung No. 16 Tahun 2018?; (2) Bagaimana transparansi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung? dan (3) Apakah yang menjadi kendala dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Implementasi pengelolaan anggaran untuk meningkatkan transparansi di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung berdasarkan Perda Kabupaten Badung No. 16 Tahun 2018 dipengaruhi oleh (a) standar dan sasaran kebijakan, (b) Sumber daya kebijakan, (c) komunikasi antar organisasi, (d) karakteristik badan pelaksana, (e) disposisi implementor dan (f) kondisi sosial ekonomi dan politik; (2) Transparansi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung belum bisa diwujudkan dengan baik; dan (3) Kendala dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung meliputi (a) kendala dari faktor sumber daya berasal dari keterbatasan sumber pembiayaan yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Badung, (b) kendala dari faktor komunikasi berasal dari pola komunikasi yang memisahkan komunikasi diantara para pimpinan dan para pelaksana; dan (c) kendala yang berasal dari faktor disposisi disebabkan masih lemahnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan anggaran

Kata Kunci: *Transparansi, Anggaran, Implementasi, Kebijakan Publik.*

Budget transparency must be clear so as to facilitate the parties concerned and but ordinary people can also find out and access it. The above mentioned condition serves as background of this research in frame of disclosing and analyze (1) How is the implementation of budget management to increase transparency in the Badung Regency Education, Youth and Sports Office (Disdikpora) based on Badung District Regulation No. 16 of 2018?; (2) How about transparency in budget management at the Badung Regency Education, Youth and Sports Office (Disdikpora)? and (3) What are the obstacles in realizing transparency in budget management in the Education Office, Youth and Sports (Disdikpora) of Badung Regency?. The method used in this research is descriptive qualitative. The research result indicated (1) Implementation of Budget Management to Increase Transparency in the Education, Youth and Sports (Disdikpora) Office of Badung Regency based on Badung District Regulation No. 16 of 2018 is influenced by (a) standards and policy objectives, (b) Policy resources, (c) communication between organizations, (d) characteristics of implementing agencies, (e) disposition of implementors and (f) socio-economic and political conditions; (2) Transparency in Budget Management at the Badung Regency Education, Youth and Sports Office (Disdikpora) has not been realized properly, and (3) Constraints in Realizing Transparency in Budget Management in the Education, Youth and Sports (Disdikpora) Office of Badung Regency include (a) constraints from resource factors originating from the limited funding sources allocated from the Badung Regency APBD, (b) constraints from communication factors comes from a communication pattern that separates communication between leaders and implementers; and (c) the constraints stemming from disposition factors are due to the weak coordination and synchronization functions in budget preparation..

A
B
S
T
R
A
C
T

Keywords: *Transparency, Budget, Implementation, Public Policy.*

A. PENDAHULUAN

Transparansi anggaran meliputi terbukanya akses informasi sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Bukan hanya untuk pihak yang berkepentingan, namun masyarakat awam juga dapat mengetahui dan mengaksesnya. Anggaran adalah rencana kuantitatif yang meliputi aspek keuangan dan non keuangan.

Banyak hal yang dianggarkan sesuai dengan ketentuan pemerintah seperti program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program fasilitas pindah/purna tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS), program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program pendidikan non formal, program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, dan program pendidikan perencanaan. Hal-hal tersebut diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pemerintahan dan tidak jarang terjadi revisi anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kabupaten Badung, hal ini tentunya kembali lagi kepada dasar dari pembuatan anggaran pada saat awal dibuatnya.

Sering kali menjadi kendala adalah apabila anggaran dirasa kurang tepat sasaran dan perlu dilakukan revisi anggaran hal ini terkendala karena revisi anggaran hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran yaitu pada bulan Juli tahun bersangkutan, yang menjadi persoalan adalah bagaimana dengan anggaran yang selanjutnya apabila terdapat anggaran yang harus direvisi kembali tetapi terkendala dengan adanya peraturan pelaksanaan revisi anggaran tersebut. Bahwa perubahan atau revisi anggaran yang dilakukan tidak boleh merubah nilai pagu anggaran yang sudah disetujui, perubahan atau revisi anggaran adalah hanya merubah nilai nominal dari poin-poin kegiatan yang ada, menambahkan dana yang lebih diperlukan dan mengurangi dana yang sifatnya dapat ditunda pelaksanaannya sehingga pada jumlah akhirnya tetap akan sesuai dengan nilai pagu anggaran.

Pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung bisa dikatakan sudah cukup baik. Namun dilihat dari transparansinya, pengelolaan anggaran ini belum dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan demikian, pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung yang seharusnya bisa diakses oleh masyarakat pada website Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung, namun hingga saat ini masyarakat masih sulit atau bahkan tidak bisa mengakses data tersebut. Contoh pengelolaan anggaran yang belum transparan seperti belum jelasnya sumber keuangan yang digunakan, kontribusi APBD Kabupaten Badung terhadap anggaran Disdikpora Kabupaten Badung, dan sebagainya.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Sugiyono, 2017: 64), yang dalam hal ini adalah lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung.

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang data yang diperlukan. Dalam penentuan informan teknik yang digunakan adalah purposif, yaitu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Selanjutnya untuk menjaring data, diawali dengan penentuan informan kunci yang dalam hal ini adalah Kepala Bagian Keuangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk membahas hasil penelitian digunakan teori implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi pengelolaan anggaran untuk meningkatkan transparansi di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung berdasarkan Perda Kabupaten Badung No. 16 Tahun 2018 dipengaruhi oleh standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, dan lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang diuraikan sebagai berikut :

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Meskipun sudah ada standar pedoman penyusunan anggaran seperti yang diatur dalam Perda Kabupaten Badung No. 16 Tahun 2018, namun dalam pelaksanaannya transparansi anggaran belum bisa diwujudkan dengan baik, terbukti masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan atau mengakses anggaran baik secara langsung di Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung ataupun melalui website resmi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung.

2. Sumber Daya

Dari hasil penelitian Ditemukan bahwa sumber daya manusia Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung yang berada di kantor sudah cukup. Tapi pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung tidak hanya yang ada di kantor saja, tapi juga yang ada di lapangan. Kalau menyangkut yang di lapangan ini, sumber daya manusia tersebut masih kurang.

3. Komunikasi

Dari hasil penelitian Ditemukan bahwa komunikasi dalam penyusunan anggaran dan penge

lolaan keuangan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung dilakukan baik secara formal maupun secara informal. Komunikasi formal dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi baik dalam lingkup Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung maupun dalam lingkup Kabupaten Badung. Sementara itu komunikasi informal bisa dilakukan pada tingkat pelaksana melalui telp, email ataupun WA.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian Ditemukan bahwa karakteristik pelaksana kebijakan dilihat dari kemampuan pemahaman permasalahan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah dan pengetahuan mengenai akuntansi keuangan daerah khususnya Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD), kemampuan membuat perencanaan dalam pelaksanaan anggaran serta kemampuan melakukan evaluasi secara berkala sudah cukup memadai. Latar belakang pendidikannyapun cukup mendukung tugas penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung yaitu pada umumnya pegawai yang bertanggungjawab di bidang keuangan berlatar belakang akuntansi atau manajemen keuangan.

5. Disposisi Implementor

Berdasarkan hasil penelitian Ditemukan bahwa kejujuran dan komitmen petugas pelaksana di Bagian Keuangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung sudah cukup baik, khususnya untuk kejujuran. Hal ini dibuktikan hingga saat ini belum ada kasus korupsi atau kecurangan-kecurangan lain di Bagian Keuangan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung. Kalau untuk komitmen memang masih harus ditingkatkan mengingat kadang-kadang masih ada laporan keuangan yang terlambat dan juga masih adanya temuan-temuan dalam audit Laporan Keuangan.

6. Lingkungan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan kondisi politik Ditemukan bahwa penyusunan anggaran dijamin pemerintahan Presiden Joko Widodo disusun sehemat mungkin. Banyak pos yang dikurangi atau bahkan dipangkas sama sekali. Pos-pos yang kurang produktif seperti misalnya perjalanan dinas, entertainment, kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial dan yang kurang atau tidak produktif lainnya dikurangi atau bahkan ditiadakan. Hal itu dilakukan sejak awal untuk menghindari revisi anggaran yang berkali-lagi.

Transparansi keuangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung merupakan keterbukaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung kepada masyarakat untuk mengakses informasi keuangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Badung berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban keuangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung tersebut. Transparansi keuangan dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan keuangan untuk kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi keuangan mengisyaratkan bahwa laporan keuangan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat.

Untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung bukannya tanpa kendala. Dari hasil penelitian dan berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, kendala-kendala tersebut meliputi kendala dari faktor sumber daya, kendala dari faktor komunikasi dan kendala dari faktor disposisi yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kendala dari Faktor Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kendala dari faktor sumber daya berasal dari keterbatasan sumber pembiayaan yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Badung. Kondisi ini merupakan dampak dari kebijakan anggaran ketat dari Presiden Joko Widodo. Akibatnya Bagian Keuangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung yang harus mencukup-cukupkan anggaran yang tersedia dengan program yang harus dilaksanakan.

2. Kendala dari Faktor Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi yang memisahkan komunikasi diantara para pimpinan dan komunikasi diantara para pelaksana, menjadikan kendala dalam penyusunan anggaran. Memang seharusnya, pola komunikasi itu tidak perlu dibeda-bedakan tapi dilakukan koordinasi antara seluruh pimpinan dengan para pelaksana, sehingga semua yang terlibat dalam penyusunan anggaran mengetahui permasalahan sejak dari awal yang pada akhirnya dapat mempercepat dalam penyusunan anggaran.

3. Kendala dari Faktor Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kendala yang berasal dari faktor disposisi disebabkan masih lemahnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan anggaran. Pimpinan menghendaki pos-pos tertentu untuk digabungkan, sedangkan ditingkat pelaksana bertahan untuk tidak digabungkan. Alasan pimpinan untuk menggabungkan pos-pos tertentu itu untuk menyederhanakan anggaran. Sementara itu, pihak pelaksana yang memandang

tidak perlu menggabungkan pos-pos tertentu tersebut beralasan agar anggaran ditampilkan lebih detail yang akan memudahkan pengontrolan dalam pelaksanaannya. Adanya perbedaan ini berdampak kurang adanya konsistensi dan keterpaduan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi pengelolaan anggaran untuk meningkatkan transparansi di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung berdasarkan Perda Kabupaten Badung No. 16 Tahun 2018 dipengaruhi oleh (a) standar dan sasaran kebijakan, (b) Sumber daya kebijakan, (c) komunikasi antar organisasi, (d) karakteristik badan pelaksana, (e) disposisi implementor dan (f) kondisi sosial ekonomi dan politik.
2. Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung belum bisa diwujudkan dengan baik, terbukti masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan atau mengakses anggaran baik secara langsung di Kantor Disdikpora Kabupaten Badung ataupun melalui website resmi Disdikpora Kabupaten Badung.
3. Kendala dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung meliputi (a) kendala dari faktor sumber daya berasal dari keterbatasan sumber pembiayaan yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Badung, (b) kendala dari faktor komunikasi berasal dari pola komunikasi yang memisahkan komunikasi diantara para pimpinan dan komunikasi diantara para pelaksana di Disdikporaa Kabupaten Badung dan (c) kendala yang berasal dari faktor disposisi disebabkan masih lemahnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan anggaran.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andrianto, Nico. 2017. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-Government*. Malang: Bayumedia Publising.
- Bahtiar, Arif. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darise, Nurul. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Didjaja, Mustopa. 2013. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 1981. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Penyunting Muhadjir Darwin*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Edward III, George E., and Sharkansky, I. 2012. *The Policy Predicament*. San Fransisco: W.H. Freeman and Company.
- Edward III, George E., 1980. *Understanding Public Policy*. Englewood, New Jersey: Prentice Hall Inc
- Ermaya, Suradinata, 2013. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan dalam Kondisi Era Globalisasi*. Bandung: Ramadhan.
- Friedrick, Carl J. 2013. *Man and His Government*. Newyork: McGraw-Hill.
- Ghozali, Imam dan Sabeni, Arifin. 2017. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE.
- Hogwood, Brian W., DAN Lewis A. Gunn. 2001. *Policy analysis for the real world*. Oxford: Oxford Univeristy Press.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman dan Sri Handayani. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Krina, Loina Lalolo. 2013. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kristianten. 2016. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kumorotomo, Wahyudi dan Purwanto, Erwan Agus. A,E. 2005. *Anggaran Berbasis Kinerja Konsep dan Aplikasinya*. Yogyakarta: MAP-UGM.
- Maarse F. 2004. *Implementation of Public Policies*. Swets North America: Berwyn.
- Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 2014. *Analisis dan Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pramono, Hariadi, Restianto. Yanuar E., dan Bawono, Icuk Rangga. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pusdiklatwas BPKP. 2013. *Sistem Administrasi Keuangan Negara 1*. Edisi 6. Jakarta.
- Rochman, Meuthia Ganie. 2018. *Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*. Jakarta: Penerbit Komnas HAM.
- Sabarno, Hari. 2017. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Purwo. 2010. *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sulaeman, Affan. 2012. *Public Policy-Kebijakan Pemerintah*. Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.

- Sungguno, Bambang. 2010. *Hukum dan kebijaksanaan publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suradinata, E. 2013. *Teori dan Praktek Kebijakan Negara*. Bandung: Ramadan.
- Sutarno NS. 2011. *Manajemen Perpustakaan*. Jakarta: Samitra Media Utama.
- Syahrudin, 2011. *Reformasi Penganggaran Negara: Sebuah Paradigma Baru*. Jakarta: Airlangga.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2014. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Tjokroamidjoyo, Bintoro, 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Van Meter, Donald dan Horn, Carl Van. 1999. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society*. London: Sage.
- Wahab, Solichin Abdul. 2011. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudera, 2011, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____. 2014. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Winardi, J. 2010. *Azas-Azas Manajemen*. Bandung: Alumni.

Makalah/Jurnal

- Alim, M. Nizarul. 2013. “Efektivitas Perpaduan Komponen Anggaran dalam Prosedur Anggaran: Pengujian Kontijensi Matching”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 10, No. 2.
- Arifani, Cindy. 2018. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Jayapura)”. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* Vol. 13, No. 1.
- Endrayani, Komang Sri, I Made Pradana Adiputra dan Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja)”. *e-Journal Akuntansi*. Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2, No. 1.
- Gunawan, Dimas Rizky. 2016. “Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya)”. *Jurnal Akuntansi Akrua*, Vol. 8, No. 1.
- Hajar, Nuzul Ibnu. 2017. “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara”. Tesis, Magister Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo, Kendari.
- Kaha, Cornelia Diana. 2019. “Implementasi Pengelolaan Anggaran dalam Meningkatkan Transparansi di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung”. Tesis, Program Magister Ilmu Administrasi, Universitas Ngurah Rai, Denpasar.

- Latief, Firmanto dan Mutiarin, Dyah. 2016. “*Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2014*”. Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik, Vol. 3, No. 2.
- Mardiasmo. 2012. “*Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*”. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2, No. 1.
- Medina, C dan Rufin, R. 2015. “*Transparency Policy and Students’ Satisfaction and Trust*”. Transforming Government: People, Process and Policy Vol. 9 No. 3.
- Muljo, Hery Harjono, Heny Kurniawati dan Pahala. 2014. “*Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran*”. Binus Business Review, Vol. 5 No. 2.
- Pitono, Andi. 2011. “*Implementasi Kebijakan Pendelegasian Wewenang Dari Bupati Kepada Camat Bidang Pengembangan Otonomi Daerah dan Kependudukan*”. Jurnal Pamong Praja Memikirkan dan Mencerahkan Pemerintahan, Jakarta : DPN-IKAPTK, Vol. I, No. 2.
- Purnama, Fadhil Akbar dan Purwatiningsih. 2013. “*Analisis Anggaran Sebagai Alat Bantu Penerapan Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Dalam Kaitannya Dengan Good Public Governance (Studi Kasus: APBN Tahun 2012 Di Kementerian Kesehatan RI)*. Jurnal. Program Studi Akuntansi Universitas Indonesia.
- Putri, Hardina Sari. 2018. “*Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2015*”. Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.
- Ronald, Andreas dan Sarmiyatiningsih, Dwi. 2010. “*Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo*”. Efektif Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol.1, No.1.
- Sa’adah, Binti. 2015. “*Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government (Studi tentang Penganggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar)*”. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 3, Nomor 2.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2018 *tentang Pengelolaan Peunysunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018*.

Internet

- Nurrochmat. 2010. *Kebijakan Publik*, Artikel diperoleh dari webside, <http://www.perpin.wordpress.com>.